



LAPORAN PENELITIAN

REAKSI PASAR TERHADAP KETEPATAN-WAKTU PELAPORAN  
KEUANGAN:  
STUDI DI BURSA EFEK JAKARTA

Oleh:

Drs. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt

Drs. Gitoyo, M.Si., Akt

---

BIAYA OLEH BAGIAN PROYEK PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA  
DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TAHUN ANGGARAN 2002

UPT-PUSTAK-UNDIP

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR  
HASIL PENELITIAN DOSEN MUDA DAN KAJIAN WANITA**

---

1. a. Judul Penelitian : Reaksi Pasar Terhadap Ketepatan-Waktu Pelaporan Keuangan :  
Studi di Bursa Efek Jakarta  
b. Kategori Penelitian : II
2. Ketua Peneliti  
a. Nama Lengkap dan Gelar : Drs. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt  
b. Jenis Kelamin : laki-laki  
c. Pangkat/Golongan/NIP : Penata/III-D/131 764 486  
d. Jabatan Fungsional : Lektor  
e. Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi  
f. Universitas : Diponegoro
3. Jumlah Tim Peneliti : 2 orang
4. Lokasi Penelitian : Jakarta
5. Kerjasama dengan Institusi lain : Tidak Ada
6. Jangka Waktu Penelitian : 8 Bulan
7. Biaya yang Dibelanjakan : Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)
- 

Semarang, Oktober 2002  
Ketua Peneliti,



Drs. M. Syafruddin, M.Si., Akt  
NIP. 131 764 486



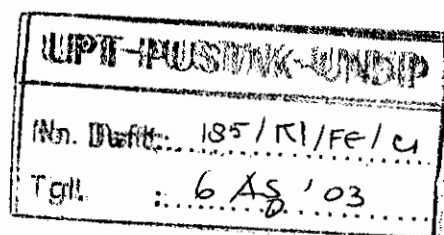
## RINGKASAN DAN SUMMARY

*The environmental liabilities is a noise factor of perception in accounting earnings information. This study examines the effect of environmental liabilities for earnings response coefficients by using the approach of event study.*

*This study was conducted in Jakarta Stock Exchange (JSX). Among 155 firms of manufactures from some kinds of industries that listed in JSX, were taken 93 firms purposively to become sample. The sample were divided into two groups, 41 firms are classified as the group of Potentially Responsible Party (PRP) and 52 firms as the group of Non Potentially Responsible Party (non-PRP). Documentation technique was employed together data. Multiple regression and independent sample t-test were used to analyzed data after fulfilling classical and assumptions and test requirement.*

*The results provide some support for the hypothesis that the earnings response coefficients for Potentially Responsible Party (PRP) firms are lower than the earnings response coefficients for non-Potentially Responsible Party (non-PRP) firms.*

*It is hoped from this research will be able to add our understanding about one of implication of firms environmental liabilities. First, evidence for the relationship between of environmental liabilities information and earnings response coefficients should be useful for investors in taking decision. Second, it also has contribution to enlarge the development of accountancy literature especially study about the factors that influence Earnings Response Coefficients.*



## **PRAKATA**

Syukur alhamdulillah akhirnya penelitian ini bisa kami selesaikan dengan baik, walaupun di sana sini masih terdapat kekuarangan. Pada kesempatan ini kami selaku peneliti mohon ma'af kepada semua pihak apabila dalam proses penelitian hingga pelaporan penelitian terdapat kekuarangan. Tidak lupa ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu proses penelitian hingga pelaporan penelitian ini.

Peneliti

## I. PENDAHULUAN

Dewasa ini Laporan mengenai kewajiban lingkungan telah menjadi salah satu isu hangat dalam akuntansi, karena kewajiban lingkungan dianggap sebagai kewajiban kontinjensi yang memunculkan sejumlah besar ketidak pastian yang timbul ketika harus menentukan baik jumlah maupun waktu realisasi kewajiban sesungguhnya (Bae dan Sami 1999). Arti penting secara ekonomis kewajiban lingkungan dan laporan keuangan juga menjadi isu-isu utama bila dikaitkan dengan undang-undang perlindungan lingkungan (Johnson 1993, Naj 1988).

Kewajiban Lingkungan (*Environmental Liabilities*) merupakan gangguan persepsian (*noise factors*) yang terkandung dalam laba akuntansi, karena variabel tersebut merupakan komponen transitoris yang dilaporkan dalam laporan keuangan tahun berjalan. Kewajiban Lingkungan dapat digunakan sebagai proksi kualitas laba akuntansi. Semakin besar kewajiban lingkungan yang dilaporkan dalam laporan keuangan ( berarti semakin besar gangguan persepsian atau *noise factors* yang terkandung dalam laba akuntansi), maka semakin rendah kualitas laba akuntansi.

Menurut Bae dan Sami (1999), kewajiban lingkungan dalam laporan keuangan berpengaruh terhadap koefisien respon laba akuntansi (*Earnings Response Coeffisiens /ERC*). Koefisien Respon laba Akuntansi (*ERC*) perusahaan yang tidak berpotensi memiliki kewajiban lingkungan atau tidak bermasalah lingkungan (*non Potentially Responsibility Parties* disebut **non-PRP**) lebih tinggi dibanding perusahaan yang berpotensi atau yang bermasalah lingkungan

(*Potentially Responsibility Parties* disebut **PRP**). Perusahaan non-PRP dianggap mempunyai faktor gangguan (*noise factors*) yang lebih sedikit/rendah karena perusahaan-perusahaan non-PRP tidak mempunyai kewajiban akibat terjadinya kerusakan lingkungan yang dilaporkan dalam laporan keuangannya.

Koefisien Respon Laba Akuntansi (*Earnings Response Coeffisiens* disebut *ERC*) atau koefisien sensitivitas laba akuntansi merupakan koefisien slope atas laba akuntansi (Beaver, 1998). Koefisien Respon laba Akuntansi (*ERC*) mengukur besarnya kekuatan harga saham dalam merespon laba akuntansi, karena koefisien respon laba akuntansi (*ERC*) dapat menunjukkan kualitas laba perusahaan.

Perkembangan aturan lingkungan dari Undang-undang (UU) di USA pada penghujung tahun 1950 baik ditingkat lokal, state dan federal, dimaksudkan untuk mengurangi/menurunkan polusi air dan udara. Pada perkembangan berikutnya, aturan tersebut disempurnakan dan ditambah sesuai tuntutan masyarakat dengan membentuk *Environmental Protection Agency* (EPA) pada tahun 1970. Pada tahun 1980 *Congress* mengesahkan *Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act* (CERCLA) yang disempurnakan dengan *Superfund Amandemen and Reauthorezation Act of 1986* yang mengatur tentang pembersihan limbah berbahaya dan mengancam kerusakan lingkungan.

Dibawah superfund inilah EPA mengatur masalah kerusakan tempat akibat buangan sisa yang tidak terkendali, dengan melakukan (1) identifikasi dan

penilaian tempat yang rusak akibat pembuangan, penumpahann, dan penyimpanan bahan yang merusak lingkungan ditempat tersebut, (2) menentukan *superfund site* yang paling rusak, (3) mengidentifikasi kelompok-kelompok perusahaan yang tergolong memiliki tanggungjawab lingkungan potensial atau *Potentially Responsibility Parties* (PRP) pada setiap tempat-tempat yang rusak, (4) menegosiasi penyelesaian perbaikan kerusakan lingkungan dengan PRP, (5) memerintahkan PRP untuk memperbaiki tempat yang rusak, (6) menuntut kepada PRP biaya penggantian tempat yang rusak, dan biaya denda bila menolak.

Pengawasan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia, dari pemerintah dan pihak yang berwenang/otoritas pasar modal seperti BAPEPAM belum mewajibkan perusahaan yang *go-public* untuk melakukan audit lingkungan dan melaporkan atau *men-disclosure* dalam laporan keuangannya. Tetapi meskipun demikian, dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur lingkungan hidup yaitu Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 1982 yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan diperbaharui dengan UU No.23 Tahun 1999 dan beberapa perangkat peraturan lainnya seperti Peraturan Pemerintah (PP) No.19 Tahun 1994, Kepmen Lingkungan hidup No. Kep.11/MNLH/3/1994, Kepmen Lingkungan hidup No. Kep.15/MNLH/3/1994 paling tidak akan ikut dalam memberikan tekanan kepada pihak perusahaan agar lebih transparan dalam kebijakan dan langkah-langkah untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Berkaitan dengan Undang-Undang tentang lingkungan hidup diatas perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Jakarta (BEJ) telah banyak yang melaporkan Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dalam Annual reportnya baik dalam bentuk penyajian informasi lingkungan (PIL), studi evaluasi lingkungan (SEL), penyajian evaluasi lingkungan (PEL), dan analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Perspektif metode akuntansi lingkungan pengukuran dan penilaiannya telah dikembangkan antara lain adalah konsep Eksternalitas (Irawan,1998). Konsep ini dimaksudkan untuk melihat dampak langsung aktivitas suatu entitas terhadap lingkungan sosial, non-sosial maupun ekologis. Kerusakan lingkungan yang menjadi biaya lingkungan sebenarnya merupakan bagian operasional perusahaan (biaya produksi) yang tidak dimasukkan kedalam laporan keuangan. Konsekuensinya bila perusahaan tidak membayar biaya tersebut,berarti akan menimbulkan “**utang** “ kepada masyarakat atau pemerintah dan “ **wajib** “ dipenuhi. Jika perusahaan belum memasukkan biaya lingkungan,berarti telah mengabaikan biaya-biaya tertentu sehingga biaya dilaporkan terlalu rendah (*understatement*) dan laba dilaporkan terlalu tinggi (*overstatement*), hal ini berarti laporan keuangan yang disajikan belum memenuhi kewajaran.

Meskipun akuntansi lingkungan telah dicoba untuk dikembangkan, akuntansi lingkungan masih menghadapi ketidakpastian khususnya perlakuan terhadap biaya lingkungan itu sendiri, berapa besarnya biaya sesungguhnya dan bagaimana teknik pengukuran biayanya masih bersifat subyektif (Bart,



McNichols dan Wilson, 1997). Akibatnya jumlah kewajiban lingkungan (*environmental liabilities*) yang sesungguhnya maupun yang potensial akan terjadi sulit untuk diestimasi, dan kemungkinan pemulihan asuransi atau klaim dari pihak ketiga seringkali tidak diketahui sedangkan pengaruh peraturan pemerintah pun terkadang masih belum pasti. Konsekuensinya, sekali perusahaan masuk dalam kelompok PRP atau bermasalah terhadap lingkungan, maka perusahaan tersebut akan menghadapi ketidakpastian bagian alokasi biaya perbaikan yang dibebankan kepadanya. Ketidakpastian kewajiban lingkungan (*environmental liabilities*) ini akan mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan sehingga juga akan berpengaruh pula terhadap interpretasi atau ekspektasi investor (sebagai reaksi pasar) tentang besarnya laba yang dilaporkan perusahaan.

Pedoman akuntansi dalam hal pengakuan dan evaluasi adanya biaya dapat diterapkan SFAS No.5 dan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.8) yang menyatakan bahwa kerugian kontinjensi (*contingency*) harus di himpun atau diakui melalui suatu pembebanan dalam laporan laba/rugi bila kerugian dimasa mendatang besar kemungkinan terjadi (*probable*) peristiwa dimasa mendatang, dan dapat dilakukan estimasi yang layak (*reasonably estimable*) terhadap jumlah kerugian yang timbul.

Penelitian ini menguji pengaruh kewajiban lingkungan terhadap koefisien respon laba akuntansi dengan menggunakan pendekatan / metode studi peristiwa (*event study*).

Sejak penelitian yang dilakukan oleh Bart dan McNichols (1994), kemudian banyak bermunculan peneliti-peneliti akuntansi keuangan yang menyelidiki isu-isu tentang akuntansi lingkungan dalam konteks penilaian saham (*security valuation*) seperti Campbell et al. 1995; Johnson 1995; Kennedy et al 1995; Little et al.1995; Northcut 1995; Blacconiere and Northcut 1997. Penelitian lainnya dibidang pasar modal yang difokuskan pada penentuan Koefisien Respons Laba (*earning response coefficient,ERC*), yang secara umum diduga sebagai koefisien kemiringan dalam regresi return abnormal pada pengukuran laba. Berbagai kajian tentang kualitas laba ditemukan bahwa ERC berhubungan secara positif dengan persistensi laba (*earning persistence*) dan pertumbuhan , serta berhubungan secara positif dengan tingkat bunga bebas resiko dan beta (Baever dkk. 1980; Foster 1986; Kormendi dan Lipe 1987; Easton dan Zmijewski 1989).

Beberapa penelitian lainnya juga telah dilakukan untuk menganalisis apakah ada hubungan kualitas laba yang dilaporkan dengan reaksi harga saham (Imhoff dan Lobo 1992; Lee dan Sami 1996), dan kualitas laba dengan faktor-faktor lain seperti pengaruh industri (Lipe 1990), pertumbuhan perusahaan (Biddle dan Seow 1991, Harikumar dan Harter 1995), kualitas audit (Teoh dan Wong,1993), kewajiban/"utang" lingkungan (Bae dan Sami,1999),dan laba (rugi) selisih kurs (Chandrarin, 2001) . Penelitian-penelitian tentang kualitas laba (*earning*) tersebut sering disebut sebagai *penelitian determinants of the earning response coefficients* atau ERC.

Sebagaimana halnya penelitian yang dilakukan oleh Bae dan Sami (1999) dan Chandrarin (2001), motivasi untuk fokus pada variabel kewajiban lingkungan (*environmental liabilities*) pada penelitian ini, karena variabel ini merupakan gangguan persepsian yang terkandung dalam laba akuntansi. Menurut Bae dan Sami (1999) terdapat hubungan yang signifikan antara koefisien respon laba akuntansi (*ERC*) dengan kewajiban lingkungan (*environmental liabilities*) yang berbeda antara perusahaan-perusahaan yang potensial (PRP) dan perusahaan-perusahaan yang tidak potensial (non-PRP). Kelompok perusahaan-perusahaan non-PRP (tidak bermasalah lingkungan) mempunyai koefisien respon laba akuntansi (*ERC*) yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok perusahaan-perusahaan PRP (potensi atau bermasalah lingkungan). Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menganalisis kembali, apakah pasar modal di Indonesia melakukan reaksi yang sama terhadap kualitas informasi laba yang diakibatkan oleh kewajiban lingkungan yaitu **dengan cara menguji hubungan respon laba bukan harapan (*Unexpected Earnins*) dengan perubahan return tidak normal (*abnormal return*)**. Penelitian ini juga menguji konsistensi hasil penelitian terdahulu Bae dan Sami (1999) yang dikembangkan di pasar modal yang sudah mapan, sehingga perlu dibuktikan konsistensinya dipasar modal yang sedang berkembang, meskipun standar akuntansi keuangan yang mendasari laporan keuangan di negara maju dan berkembang relatif sama.